

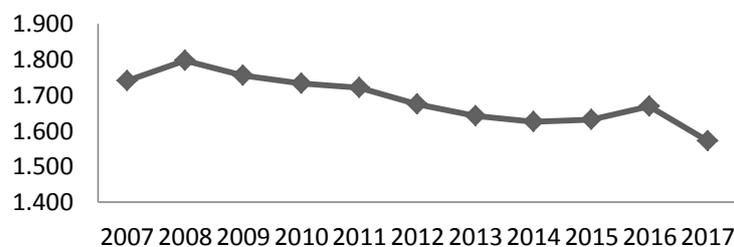
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian penduduknya, dengan demikian sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Kenyataan yang terjadi bahwa sebagian besar penggunaan lahan di wilayah Indonesia diperuntukan sebagai lahan pertanian dan hampir 50 persen dari total angkatan kerja masih menggantungkan kebutuhan hidupnya pada sektor pertanian. Keadaan seperti ini menuntut kebijakan pemerintah pada sektor pertanian disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan yang terjadi dilapangan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut kesejahteraan bangsa, (Yamin *dalam* Deranda. 2017).

Beras sebagai bahan makanan pokok yang dikonsumsi oleh hampir 90 persen penduduk Indonesia mengandung nilai gizi lebih baik dibandingkan dengan makanan pokok lainnya. Setiap 100 gr beras giling mengandung energy 360 KKal dan menghasilkan 6 gr protein. Hal ini dapat dibandingkan bahan makanan lain seperti jagung yang mengandung 307 KKal dan 7,9 gr protein ataupun ketela pohon yang mengandung 146 KKal dan 1,2 gr protein (Riyanto *et al.*, 2013).

Konsumsi Beras di Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan 2015 mengalami penurunan tingkat konsumsi per kapita. Pada tahun 2016, tingkat konsumsi beras per kapita di Indonesia mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Gambar 1. Rata-Rata Konsumsi Beras per Kapita Seminggu di Indonesia tahun 2007-2017.

Berdasarkan Gambar 1, tahun 2017 penduduk Indonesia dalam seminggu mengkonsumsi beras rata-rata 1,571 kg per orang lebih rendah dibanding dengan tahun sebelumnya rata-rata 1,668 kg per orang. Sejak tahun 2008 hingga 2017, perkembangan konsumsi beras penduduk Indonesia menurun dari 1,797 kg per orang tahun 2008 turun menjadi 1,571 kg per orang pada tahun 2017. Penurunan tingkat konsumsi ini dikarenakan mulai banyaknya keanekaragaman pangan pokok selain beras sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan. Hal ini sejalan dengan program diversifikasi dari Badan Ketahanan Pangan Kementan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras.

Begitu pentingnya peranan beras, maka negara-negara berkembang terutama Indonesia telah menjadikan swasembada beras sebagai tujuan kebijakan nasional. Dalam catatan sejarah, Indonesia pernah menjadi pelopor dalam revolusi hijau yang mendorong peningkatan pangan terutama padi pada tahun 1960-an. Mulai saat itu tingkat kesejahteraan penduduk meningkat dan penduduk miskin berkurang secara signifikan. Tingkat ketahanan pangan pun terus meningkat yang dicirikan dengan surplus beras sehingga negara kita mencapai swasembada pangan pada tahun 1984 (Riyadi, 2012).

Kebijakan intensif berupa penetapan harga dasar yang dilanjutkan dengan harga dasar pembelian pemerintah (HDPP) tidak akan terlaksana secara efektif apabila pemerintah tidak menetapkan kebijakan pendukung yang *compatible* dengan HDPP. Pengurangan subsidi pupuk maka kebijakan harga dasar menjadi tidak efektif, karena akan menurunkan pendapatan petani produsen dan mutu intensifikasi yang diterapkan oleh petani padi (Malian, 2009).

Sementara itu krisis ekonomi yang terjadi semenjak pertengahan tahun 1997 mengakibatkan harga beras melonjak tajam dalam waktu singkat. Selama periode tersebut pemerintah telah banyak mengubah kebijakan perberasan nasional baik pada tingkat usaha tani maupun pada tingkat pasar. Dengan segala baik buruknya, bangunan kebijakan perberasan yang dioperasionalkan selama lebih kurang lebih dua puluh tahun mampu menstabilkan pasokan (ketersediaan) dan harga beras. Namun, sejak krisis ekonomi tahun 1997 penopangnya runtuh satu persatu sehingga tersisa kebijakan harga yang tidak lagi efektif. Setelah terjadi krisis

ekonomi dan dibebaskan impor beras masuk ke Indonesia dan ditambah lagi dengan rendahnya harga beras dipasar dunia, kebijakan perlindungan pemerintah terhadap petani padi menjadi sulit dilakukan oleh pemerintah. Kondisi seperti ini menjadi perbincangan apakah kebijakan tersebut masih perlu dipertahankan atau sebaliknya dihapuskan saja.

Pada tahun 2015, pemerintah kembali menerbitkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh pemerintah. Pada peraturan tersebut pemerintah mengatur harga dasar pembelian pemerintah (HDPP) terhadap komoditi padi sebesar Rp 3.700 per kg. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (2018) yang dilakukan di 1.828 lokasi transaksi penjualan gabah di 31 provinsi selama juli 2018, mencatat harga rata-rata gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp 4.633 per kg. Angka ini menurun tipis dibandingkan dengan hasil survey juni 2018 yang mencatat harga rata-rata GKP ditingkat petani Rp 4.650 per kg. Penurunan harga gabah ditingkat petani sejalan dengan penurunan nilai tukar usaha pertanian (NTUP) tanaman pangan. Menurut Badan Pusat Statistik (2018), NTUP tanaman pangan menurun tipis dari 107,85 pada juni 2018 menjadi 107,72 pada juli 2018. NTUP merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh petani (It) dengan indeks harga yang dibayar oleh petani (Ib) dengan komponen Ib hanya meliputi biaya produksi dan penambahan barang modal.

Permintaan beras di Provinsi Bangka Belitung belum bisa tergantikan oleh bahan makanan lainnya. Menurut data dari Dinas Komunikasi dan informasi Provinsi Bangka Belitung (2018), pada tahun 2017, kebutuhan konsumsi beras sebesar 1.200 ton per bulan dan 14.400 ton per tahun. Hal ini juga berbanding lurus dengan produksi beras yang menjadi produk tanaman pangan yang paling banyak diproduksi dibanding tanaman pangan lainnya seperti ketela pohon dan jagung.

Tabel 1. Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2012 - 2016.

| Kabupaten/Kota <i>Regenci/Municipality</i> | Luas Panen <i>Harvested Area</i> (ha) | Produksi <i>Production</i> (ha) | Produktivitas <i>Productivity</i> (ton/ha) |
|--|---|---|--|
| Bangka | 3 654 | 6 862 | 1,88 |
| Belitung | 656 | 1 557 | 2,37 |
| Bangka Barat | 3 642 | 6 172 | 1,69 |
| Bangka Tengah | 392 | 884 | 2,26 |
| Bangka Selatan | 6 166 | 17 727 | 2,87 |
| Belitung Timur | 1 020 | 2 186 | 2,14 |
| Pangkalpinang | - | - | - |
| Jumlah/Total | 2016 15 530 | 35 388 | 2,28 |

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Dilihat dari Tabel 1, produksi padi sawah dan ladang di Provinsi Bangka Belitung pada posisi pertama produksi terbesar adalah Kabupaten Bangka Selatan dengan produksi 17.727 ton, kemudian Kabupaten Bangka dengan produksi sebesar 6.862 ton, Kabupaten Bangka Barat 6.172 ton, Belitung Timur 2.186 ton, Belitung 1.557 ton, dan Bangka Tengah 884 ton. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka Selatan merupakan daerah penghasil padi sawah terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penetapan Kabupaten Bangka Selatan sebagai lumbung padi dilihat dari produksinya setiap tahun (Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Bangka Belitung, 2017).

Tabel 2. Luas Panen dan Poduksi Padi Sawah dan Padi Ladang per Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan, 2017

| Kecamatan <i>Subdistrict</i> | Padi Sawah/Wetland Paddy | | Padi ladang/Dryland paddy | |
|--|--|--|--|--|
| | Luas Panen <i>Harvested Area</i> | Produksi*) <i>Production</i> | Luas Panen <i>Harvested Area</i> | Produksi*) <i>Production</i> |
| Payung | 79 | - | 501 | - |
| Pulau Besar | 909 | - | 6 | - |
| Simpang Rimba | 222 | - | 98 | - |
| Toboali | 3211 | - | - | - |
| Tukak Sadai | - | - | - | - |
| Air Gegas | 90 | - | 1 | - |
| Lepar Pongok | 56 | - | - | - |
| Kepulauan Pongok | 68 | - | - | - |
| Jumlah/Total 2017 | 4 635 | - | 605 | - |

Sumber : Dinas Pertanian, Pangan, perikanan Kabupaten Bangka Selatan, 2017

Berdasarkan Tabel 2. Menunjukkan bahwa Kabupaten Bangka Selatan memiliki 8 Kecamatan yang berpotensi dalam usahatani padi sawah. Diantara 8 Kecamatan tersebut ada yang belum melakukan usahatani padi sawah yaitu

Kecamatan Tukak Sadai, sedangkan 7 Kecamatan yang telah melakukan usahatani padi sawah yaitu Kecamatan Payung, Kecamatan Pulau Besar, Kecamatan Simpang Rimba, Kecamatan Toboali, Kecamatan Air Gegas, Kecamatan Lepar Pongok dan Kepulauan Pongok. Kecamatan Toboali menjadi salah satu Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan yang menghasilkan padi tertinggi dengan luas panen 3211 Ha.

Kecamatan Toboali merupakan salah satu nama Kecamatan sekaligus nama Ibukota dari Bangka Selatan. Nama lain dari Toboali adalah Sabang yang dalam pelafalan orang Toboali disebut Habang. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian di Kecamatan Toboali. Dilihat dari subsektor pendukungnya, kontribusi subsektor tanaman bahan makanan merupakan yang terbesar. Pada subsektor tanaman bahan makanan, padi merupakan komoditas utama karena menghasilkan produksi yang terbesar dibandingkan dengan komoditas tanaman bahan makanan lainnya. Kecamatan Toboali memiliki 11 Desa yang terdiri dari Desa Rias, Desa Teladan, Desa Tanjung Ketapang, Kota Toboali, Desa Kepoh, Desa Rindik, Desa Kaposang, Desa Gadung, Desa Bikang, Desa Jeriji dan Desa Serdang. Desa Rias merupakan Desa tertinggi yang memproduksi Padi di Kecamatan Toboali dengan produksi mencapai 11.563 Ha. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi Sawah dan Padi Ladang Menurut Kelurahan/Desa di Kecamatan Toboali Tahun 2017

| Desa Village | Padi Sawah <i>Rice Paddy</i> | | Padi Ladang <i>Field Paddy</i> | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | Luas Panen <i>Harvested</i> | Produksi <i>Production</i> | Luas Panen <i>Harvested</i> | Produksi <i>Production</i> |
| | <i>Area</i> | | <i>Area</i> | |
| 1. Rias | 2 660 | 11 563,0 | - | - |
| 2. Teladan | - | - | - | - |
| 3. Tanjung Ketapang | - | - | - | - |
| 4. Toboali | - | - | - | - |
| 5. Kepoh | 27 | 117,8 | - | - |
| 6. Rindik | - | - | - | - |
| 7. Kaposang | - | - | - | - |
| 8. Gadung | - | - | - | - |
| 9. Bikang | - | - | - | - |
| 10. Jeriji | - | - | - | - |
| 11. Serdang | 524 | 2 275,4 | - | - |
| Jumlah/Total | 3 211 | 13 956,2 | - | - |

Sumber: Balai Penyuluhan Pertanian dan Perikanan Kecamatan Toboali, 2017

Pada tahun 2017, produksi tanaman padi sawah di Desa Rias mencapai 11.563,0 ton dengan luas panen sebesar 2.660 Ha, kemudian diikuti oleh Desa Serdang dengan produksi 2.275,4 ton dan luas panen sebesar 524 Ha, dan yang terakhir adalah Desa Kepoh dengan produksi 117,8 ton dan luas panen sebesar 27 Ha.

Desa Rias adalah salah satu Desa di Kecamatan Toboali Bangka Selatan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sebagai lumbung padi. Desa Rias dulunya merupakan kawasan pemukiman transmigrasi pertama di Bangka Selatan. Seiring dengan perkembangannya Desa Rias lantas ditetapkan menjadi Desa Rias. Desa Rias terletak sekitar 25 Km dari Ibukota Bangka Selatan yaitu Toboali dan 90 persen penduduk Desa Rias Kecamatan Toboali bekerja sebagai petani padi. Pemerintah melalui Bupati Bangka Selatan memilih Desa Rias sebagai kawasan ketahanan pangan dan merencanakan membangun pasar pertanian sebagai usaha untuk mengekalisasi kesejahteraan warga. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Dampak Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah Terhadap Permintaan dan Penawaran Gabah di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dampak kebijakan harga pembelian pemerintah terhadap permintaan dan penawaran gabah di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan?
2. Bagaimana efektifitas kebijakan harga pembelian pemerintah dibandingkan dengan kebijakan harga pembelian pemerintah yang sebelumnya berlaku terhadap nilai jual gabah di tingkat petani?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka secara umum penelitian ini bertujuan:

1. Menganalisis dampak kebijakan harga pembelian pemerintah terhadap permintaan dan penawaran gabah di Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
2. Menganalisis efektifitas kebijakan harga pembelian pemerintah dibandingkan dengan kebijakan harga pembelian pemerintah yang sebelumnya berlaku terhadap nilai jual gabah di tingkat petani.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk berbagai pihak diantaranya sebagai berikut.

1. Sebagai bahan masukan dan bahan kajian dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang komoditas padi.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembelian harga dasar gabah.
3. Memberikan informasi dan wawasan pada masyarakat akan pentingnya harga komoditas padi dalam menunjang ketahanan pangan.